

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Eselon I
Tahun**

**: Deputi Bidang Perundang-undangan
: 2013**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
Terselenggaranya izin prakarsa, dan analisa RUU, RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan Rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, prerogatif, naturalisasi, dan perundang-undangan.	<p>1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, dan pertimbangan RPerpres sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>3. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>4. Persentase penyelesaian penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>5. Persentase analisis dan penyelesaian atas permasalahan dan permohonan grasi, amnesti abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan standar pelayanan.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

Menteri Sekretaris Negara,

Sudi Silalahi

Jakarta, Januari 2012
Deputi Bidang Perundang-undangan,



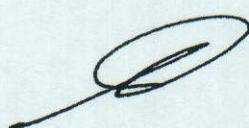
Muhammad Sapta Murti

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : ASISTEN DEPUTI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN
Tahun Anggaran : 2013

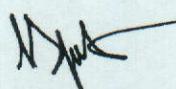
Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tersedianya analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, pertimbangan Perpres serta ijin prakarsa penyusunan RUU diluar Prolegnas, dan evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, dan PP bidang ekonomi, keuangan, dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan RPerpres di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar pelayanan 2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan 3. Persentase penyelesaian penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, Perpu, dan PP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar pelayanan 4. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar pelayanan 	100% 100% 100% 100%

Deputi Bidang Perundang-undangan,



(Muhammad Sapta Murti)

Jakarta, 18 Januari 2012
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



(Setio Sapto Nugroho)

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
ASISTEN DEPUTI PUU BIDANG POLITIK DAN KESRA**

Unit Eselon II
Tahun

: Asisten Deputi PUU Bidang Politik dan Kesra
: 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
terselenggaranya ijin prakarsa, dan analisa RUU, R Perpu, RPP, penyiapan pertimbangan RPerpres, Otentifikasi UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis perundang-undangan bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum dan HAM, aparatur negara, serta kesejahteraan rakyat	1 persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, R Perpu, RPP dan Pertimbangan R Perpres sesuai dengan standar pelayanan	100%
	2 persentase penyelesaian administratif RUU, R Perpu, RPP yang akan ditandatangani oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan	100%
	3 persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar pelayanan	100%

Menyetujui,
Deputi Bidang Perundang-undangan

Jakarta, 10 Januari 2012
Asisten Deputi PUU Bidang Politik dan Kesra


Muhammad Sapta Murti


Wisnu Setiawan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Eselon II
Tahun**

**: Asisten Deputi Hukum
: 2013**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pelaksanaan penelitian, analisis dan penyusunan pendapat hukum di bidang litigasi dan permasalahan hukum, perjanjian internasional, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian peraturan perundang-undangan.	1. Persentase gugatan dan permohonan Hak Uji Materiil yang ditelaah dan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan.	100%
	2. Persentase bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan permohonan perlindungan hukum yang ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan.	100%
	3. Persentase penyelesaian analisis RUU pengesahan perjanjian internasional, dan penyelesaian permohonan yang meliputi izin prakarsa, Surat Presiden (Ampres), pertimbangan RPerpres, permohonan ekstradisi, serta penyelesaian penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan dalam perjanjian internasional, sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan.	100%
	4. Persentase analisis dan penyelesaian atas permasalahan dan permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara serta naturalisasi, sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan.	100%
	5. Persentase UU, Perpu, PP yang didistribusikan, dipublikasikan, dan didokumentasikan sesuai dengan standar pelayanan.	100%

Deputi Bidang Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

Jakarta, Januari 2012
Asisten Deputi Hukum

Suripto